



Program Membangun Desa

“Pembangunan Desa Berkelanjutan Dalam Perspektif Administrasi Publik”

*Januar Eko Aryansah, Anggun Tri Merzia, Nabila Tri Ramadhania
Nur Syahrani, Putri Nabilla, Vellia Febby Sarah, Syska Purnama Sari*

Program Membangun Desa

**“Pembangunan Desa Berkelanjutan Dalam Perspektif
Administrasi Publik”**

Program Membangun Desa

**“Pembangunan Desa Berkelanjutan Dalam Perspektif
Administrasi Publi”**

**Januar Eko Aryansah
Anggun Tri Merzia
Nabila Tri Ramadhania
Nur Syahrani
Putri Nabilla
Vellia Febby Sarah
Syska Purnama Sari**



Program Membangun Desa

“Pembangunan Desa Berkelanjutan Dalam Perspektif Administrasi Publik”

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

**Januar Eko Aryansah
Anggun Tri Merzia
Nabila Tri Ramadhania
Nur Syahrani
Putri Nabilla
Vellia Febby Sarah
Syska Purnama Sari**

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: Juli 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini.

Program membangun desa merupakan salah satu program yang berupaya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendekatkan realitas akademis kampus dalam proses pembangunan di desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Program membangun desa perlu kita dukung bersama dengan harapan dana desa dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan desa tersebut.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas kerja samanya mulai dari awal sampai selesainya buku ini. Dan penulis menyadari bahwa penulisan buku monograf ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Palembang, Juni 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
INDIKATOR HASIL BELAJAR.....	7
BAB 1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA	8
A. Definisi Analisis Kebijakan.....	8
B. Bentuk Analisis Kebijakan.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Analisis Kebijakan Publik	10
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Kebijakan	11
E. Beberapa Contoh Permasalahan Yang Ada Di Desa	13
BAB 2 PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK	19
BAB 3 INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK	22
A. Pengertian Integritas Sektor Publik	22
B. Definisi Kinerja Pemerintahan Desa	23
C. Teori Kinerja Pemerintahan	24
D. Manfaat Kinerja Pemerintahan Sektor Publik	25
E. Faktor Yang Mempengaruhi Integritas.....	26
F. Tujuan Integritas Sektor Publik	28
BAB 4 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	37
A. Definisi manajemen	37
B. Definisi Pelayanan Publik	39

C. Manajemen Pelayanan Publik	41
D. Tujuan Manajemen Pelayanan Publik.....	42
E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	43
F. Pelayanan Publik Di Desa Sawah.....	44
BAB 5 KEWIRAUSAHAN SEKTOR PUBLIK.....	50
A. Definisi Kewirausahaan Sektor Publik.....	50
B. Manfaat Kewirausahaan Sektor Publik	50
C. Definisi BUMdes Kewirausahaan.....	52
D. Manfaat Kewirausahaan	53
E. Macam-Macam BUMdes Di Desa Sawah	54
BAB 6 MANAJEMEN BENCANA.....	62
A. Definisi Manajemen Bencana	62
B. Tujuan Dan Faktor Manajemen Bencana.....	65
C. Macam-Macam Bencana Sosial.....	65
D. Cara Mengatasi Bencana Sosial	67
E. Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana ..	68
BAB 7 ADVOKASI KEBIJAKAN.....	80
A. Definisi Advokasi Kebijakan	80
B. Tujuan Advokasi.....	83
C. Jenis dan Strategi Advokasi	84
D. Partisipasi masyarakat dalam melakukan advokasi ..	87
BAB 8 PERILAKU ORGANISASI	94
A. Perilaku Organisasi.....	94
B. Tujuan Dan Manfaat Perilaku Organisasi.....	95

C. Strategi Perilaku Organisasi	98
D. Partisipasi Dalam Perilaku Organisasi	99
BAB 9 PEMBANGUNAN REGIONAL	105
A. Definisi Pembangunan Regional	105
B. Tujuan Dan Manfaat Pembangunan Regional	105
C. Partisipasi Masyarakat.....	107
D. Potensi Desa.....	109
E. Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Regional	112
F. Perencanaan Pembangunan Regional.....	113
BAB 10 PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA.....	118



INDIKATOR HASIL BELAJAR

- ◆ Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius
- ◆ Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Agama, Moral, Dan Etika
- ◆ Menginternalisasi Nilai, Norma, Dan Etika Akademik
- ◆ Berperan Sebagai Warga Negara Yang Bangga Dan Cinta Tanah Air, Memiliki Nasionalisme Serta Rasa Tanggungjawab Pada Negara Dan Bangsa
- ◆ Menghargai Keanekaragaman Budaya, Pandangan, Agama, Dan Kepercayaan, Serta Pendapat Atau Temuan Orisinal Orang Lain
- ◆ Bekerja Sama Dan Memiliki Kepekaan Sosial Serta Kepedulian Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan
- ◆ Taat Hukum Dan Disiplin Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara
- ◆ Menginternalisasi Nilai, Norma, Dan Etika Akademik
- ◆ Menunjukkan Sikap Bertanggungjawab Atas Pekerjaan Di Bidang Keahliannya Secara Mandiri

BAB 1

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi pegawai dalam mencapai tujuan. Hal ini telah didefinisikan sebagai proses "menentukan berbagai kebijakan dalam mencapai suatu tujuan. Analisis untuk kebijakan baru, yang bersifat preskriptif yaitu, suatu analisis yang melibatkan perumusan kebijakan dan proposal (misalnya: memperbaiki kesejahteraan sosial).

Analisis kebijakan menurut William N. Dunn ialah aktivitas menciptakan pengetahuan yang relevan dari kebijakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki suatu kebijakan.

Carl Friedrich (Dalam Solichin Abdul Wahab, 2015: 9), menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

B. Bentuk Analisis Kebijakan

1. Analisis Kebijakan Prospektif
2. Analisis Kebijakan Retrospektif
3. Analisis Kebijakan Yang Terintegrasi.

Hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, yang dapat digambarkan seperti berikut:

Berikut merupakan bentuk dari analisis kebijakan dengan merujuk William N. Dunn:

1. Analisis kebijakan prospektif berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.
2. Analisis kebijakan retrospektif, dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Mencakup berbagai tipekegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis:

- Orientasi pada disiplin (discipline-oriented analysts)
 - Orientasi pada masalah (problem-oriented analysts)
 - Orientasi pada aplikasi (applications-oriented analysts)
3. Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan gabungan antara analisis prospektif dan retrospektif analisis ini cenderung kepada penciptaan transformasi kebijakan sebelum dan sesudah tindakan kebijakan dilakukan.

C. Tujuan Dan Manfaat Analisis Kebijakan Publik

Tujuannya analisis kebijakan publik sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan; dengan begitu kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
2. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan; sehingga kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak,
3. Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan dengan informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.
4. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik; kegiatan

penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.

Manfaat analisis kebijakan publik :

1. Dapat mendefinisikan masalah kebijakan; dengan begitu kita dapat mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan.
2. Dapat mengkaji penyebab masalah; kita bisa mengklasifikasikan penyebab masalah yang memang penting dan melihat titik fokus permasalahan tersebut.
3. Dapat mengevaluasi kebijakan; kita dapat melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Analisis Kebijakan

Partisipasi masyarakat menurut Soetrisno (1995:222) ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat yaitu:

- Definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana.
- Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan adanya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayahnya.

Partisipasi Sosial

Lebih tepat diartikan sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh berbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan. Dalam pengertian ini, partisipasi ditempatkan di luar negara atau lembaga-lembaga formal pemerintahan.

Karena sifatnya yang berada di luar lembaga negara atau lembaga formal pemerintahan, konsep ini dapat disebut sebagai partisipasi sosial. Selain itu, partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi program.

E. Beberapa Contoh Permasalahan Yang Ada Di Desa

Desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah. Sdm rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Berikut beberapa contoh permasalahan di Desa Sawah :

Pembangunan desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Badan usaha milik desa (Bum Desa) merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Salah satu desa di Kecamatan Muara Pinang yaitu Desa Sawah tepatnya berada di dekat gapura selamat datang perbatasan antara Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Empat Lawang. Desa Ini Juga Masih Memiliki Tempat-Tempat Bersejarah Yaitu Salah Satunya :

- Bentang persawahan yang luas serta dilalui oleh dua aliran sungai berarus deras yaitu sungai (ayek) deghian & sungai (ayek) lintang yang bermuara ke sungai musi.

Cughop ayek degian yang dilestarikan pada tahun 2022 memiliki enam tingkat aliran dimana setiap tingkat tersebut memiliki nama yang berbeda-beda. Dimulai dari cughop pelinjanan (pacar) yang berada di tingkat paling bawah, cughop ayek degian (air durian) , cughop akar, cughop duo muaro (dua muara), cughop lumotan (lumutan) dan cughop

tinggi. Salah satunya di talang klub desa sawah kecamatan muara pinang kabupaten empat lawang (sumsel). Curup ayek degian terletak di talang klub sekitar 20 menit dari desa sawah menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki selama 15 menit untuk menuju titik lokasi curup air durian. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian para pemuda, untuk membangun desa supaya curup ayek degian. Lebih dikelola oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai objek wisata dan mendatangkan wisatawan baik dari luar maupun dari dalam daerah. Untuk membantu perekonomian warga sekitar.

Wisata air terjun ini dapat memanjakan mata kalian dengan pesona air jernih yang meluncur bebas dari ketinggian sekitar 20 meter. Ditambah pemandangan alam hijau disekitar air terjun semakin menambah keindahan air terjun ini. Nama **'degian'** berasal dari banyaknya kebun durian masyarakat setempat. Air terjun curup degian diyakini oleh warga setempat bersumber langsung dari aliran air belerang gunung dempo. Tidak hanya memiliki keindahan air terjun dan pesona alamnya, di curup degian juga bisa melakukan aktivitas menarik seperti berenang dibawah air terjun atau bisa juga mping kecil bersama keluarga didekat curup.



Gambar 1.5 Foto Langsung Pemandangan Cughop Ayek Degian

Di desa ini terdapat cerita rakyat atau legenda napak tilas & kisah percintaan antara puyang serunting sakti dengan puyang putri mayangsari. Peninggalan dari legenda tersebut yang masih dapat kita telusuri & jumpai hingga saat ini adalah tumit puyang putri (pusako/pusaka peninggalan putri mayangsari), batu tapak puyang putri & telaga atau pemandian sumber mata air alami yang sangat jernih, sumur tertua ini biasa disebut dengan ulo tolong atau sekarang disebut dengan ayek berobok yang dibangun tahun 1990 tempat pemandian bidadari dari sumber mata air yang bersumber langsung dari dalam tanah dan dipercaya oleh masyarakat memiliki energi magis tetapi jika tidak ada penghuni nya air tersebut kering. Tiga tempat ini adalah peninggalan budaya benda dari napak

tilas & kisah percintaan tokoh legenda masyarakat sumatera selatan yaitu puyang serunting sakti syeikh ali muhammad atak atau si pahit lidah dengan putri mayangsari. Pemandian ini dikenal oleh masyarakat empat lawang dengan nama pemandian puyang putri yang konon katanya apabila kita mandi di pemandian tersebut dipercaya akan terlihat awet muda. "puyang" merupakan orang atau tokoh legenda yang memiliki pengaruh besar dan merupakan leluhur masyarakat setempat, dengan puyang inilah akan menunjukkan tali persaudaraan di antara masyarakat dalam skala luas" ragam pesona keindahan air terjun juga merupakan ciri khas dari desa sawah.



Gambar 1.6 Foto Langsung Batu Telapak Kaki & Mahkam
Puyang Serunting Sakti



Gambar 1.7 Foto Langsung Sipahit Lidah & Ayek Berobok

Desa sawah juga memiliki mata pencarian yaitu pertanian salah satunya sumber utama kopi robusta yang merupakan komoditas unggulan masyarakat desa sawah adalah minuman khas dari bumi saling keruani sangi kerawati. Tradisi minum kopi merupakan ritual wajib yang akan kita jumpai apabila kita singgah, jagung sebagian besar untuk pakan ternak dan dijual ke daerah-daerah lain ,untuk air dari irigasi dimanfaatkan untuk persawahan pada tahun 2020/2021 dimanfaatkan juga untuk cetak sawah baru , selain itu ada perternakan digunakan untuk kebutuhan dan dijual ke pasar selebihnya ternak kambing digunakan untuk lebaran kurban/aqiqah dan konsumsi pribadi.

BAB 2

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Pembangunan perdesaan menjadi salah satu aspek penting didalam perencanaan pembangunan, dengan membangun pedesaan maka secara langsung kita mengatasi kemiskinan. Pedesaan dapat menjadi wilayah yang mandiri yang bahkan mampu menggerakkan perekonomian wilayah dan bertujuan untuk mengubah sumber daya alam dan manusia di suatu daerah atau negara sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang maju serta meningkatkan produksi dan konsumsi sebagian besar penduduk negara kita yang hidup di wilayah pedesaan. Salah satunya Desa yang menjadi sasaran dalam program membangun desa Jurusan Administrasi publik ialah Desa Sawah yang terletak di Jalan Lintas Pagar Alam - Kepahiang (Pendopo Lintang), Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Berjarak sekitar lebih kurang 24 Km Dari Kota Pagar Alam yang dikenal sebagai Induk Pariwisata Di Sumatera Selatan. Tepatnya berada di dekat gapura selamat datang perbatasan antara Kabupaten Lahat dengan Kabupaten Empat Lawang. Secara

geografis, desa sawah terletak di dataran tinggi antara lembah merapi gunung Dempo Empat Lawang dengan deretan punggung bukit barisan yang membentang di sampai dengan perbatssan dengan Propinsi Bengkulu.

Buku monograf ini disusun agar dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemahaman bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk lebih mendalami dan memahami akan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun desa . Buku ini di kemas secara praktis, tidak berbelit-belit dan langsung tepat pada sasaran. Sumber dan rujukan yang digunakan dalam menyusun bahan ajar ini memiliki kapasitas yang memadai serta dapat sesuai dengan kondisi yang ada dan perubahan yang terus terjadi. Harapan buku ini dapat menjadi salah satu sumber dalam menambah ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengasah pengetahuan dalam berfikir dan meningkatkan pemahaman yang dimiliki sehingga menghasilkan pengethuan yang berguna untuk menopang dan mendukung laju pembangunan secara umum dan secara khusus pembangunan di desa.

Untuk mengetahui bagaimana pembangunan pedesaan desa sawah baik itu masalah publik, kinerja pemerintahan, standar

pelayanan, bumdes, bencana sosial, permasalahan kebijakan, struktur pemetaan dan potensi fisik desa.

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu dan wawasan bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama instansi pemerintahan, terkait pembangunan pedesaan desa sawah baik itu masalah publik, kinerja pemerintahan, standar pelayanan, bum des, bencana sosial, permasalahan kebijakan, struktur pemetaan dan potensi fisik desa.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diantaranya:

- Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan pemikiran berupa teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pedesaan,
- Secara praktik penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi instansi maupun lembaga pemerintahan.
- Manfaat bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan peneliti terkait dengan pembangunan dan pengembangan desa sawah.

BAB 3

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK

A. Pengertian Integritas Sektor Publik

Integritas merupakan gambaran diri di dalam suatu organisasi yang terlihat dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. salah satu contoh berintegritas adalah berpikir positif. Dengan berpikir positif kita dapat menghasilkan hasil yang positif. Oleh karena itu, integritas harus diawali dengan berpikir positif.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga seseorang akan dapat memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam menerapkan integritas dalam melaksanakan pekerjaannya, aparat pemerintah harus memiliki perilaku-perilaku berikut ini :

- Memiliki konsistensi dalam berkata dan bertindak.

- Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan.
- Berani dan tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan.
- Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

B. Definisi Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pemerintah

Di definisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (pp nomor 8 tahun 2006). Menurut nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pemerintahan desa

Kinerja pemerintah desa/organisasi adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kebutuhannya secara efektif.

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006).

C. Teori Kinerja Pemerintahan

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance sering diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan: 2009). Istilah kinerja berasal dari performance diartikan sebagai hasil kerja seseorang pegawai, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). (Yani: 2013).

Fahmi (2013: 2) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang

dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Bastian, 2006: 274).

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Tercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif.

D. Manfaat Kinerja Pemerintahan Sektor Publik

Menurut mardiasmo (2002:122) manfaat dari pengukuran kinerja sektor publik adalah :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilaikinerja manajemen
2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang

ditetapkan

3. Memonitori dan mengevaluasi pencapaian kinerja
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman secara objektif
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Integritas

1. Pengawasan

- > Peningkatan integritas pelayanan public sangat dipengaruhi oleh aspek pengawasan internal/pengawasan melekat maupun pengawasan eksternal.
- Aspek laporan masyarakat ini menyediakan 'valuable information" mengenai pentingnya perubahan kebijakan birokrasional.
- Masyarakat, lsm maupun media, dan ombudsman

dapat melakukan share the common goal of serving the public.

2. Conflict of interest dalam perilaku penyelenggara layanan publik

- > Perilaku penyelenggara pelayanan public ini dipengaruhi / bersumber dari factor internal maupun factor eksternal. Faktor internal seperti kebutuhan, motivasi kerja, insentif .
- > Faktor eksternal seperti tekanan dari atasan atau bahkan system yang memunculkan kerentanan rendahnya kualitas pelayanan public karena kurang berpihak pada hak-hak dasar masyarakat.

3. Konteks norma social dan budaya, dan nilai-nilai organisasi yang dianu

- > Bersifat tertutup terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat dengan perpspektif manipulasi masyarakat birokrasi yang unresponsive dan tidak berwawasan hukum demokratis dan berkeadilan menuju kesejahteraan.
- > Kurangnya integritas dalam etika individual maupun etika organisasi pelayanan publik.

F. Tujuan Integritas Sektor Publik

- Meraih keberhasilan atau kesuksesan hidup
- Mampu memimpin maupun dipimpin
- Agar melahirkan sebuah kepercayaan bagi oranglain
- Melahirkan prestasi

Ciri-ciri seseorang memiliki integritas

- Selalu menepati janjinya
- Tidak memiliki sifat plin-plan serta memiliki sifat taat
- Komitmen dan tanggung jawabnya tinggi serta teguh
- Jujur serta selalu terbuka kepada siapapun
- Berpegang teguh pada prinsip serta nilai-nilai yang diyakininya
- Sangat menghargai waktu
- Berprinsip satu kata, satu perbuatan

Contoh Partisipasi Pencapaian Dalam Kinerja Pemerintahan Desa Sawah

Klasifikasi Nilai Dan Interpretasi Nilai Pencapaian Kinerja Sasaran

Klasifikasi nilai pencapaian kinerja sasaran	Interprestasi nilai pencapaian kinerja sasaran
90% - 100%	BERHASIL
75% - <90%	CUKUP BERHASIL
0>% - <75%	KURANG BERHASIL
0%	TIDAK DILAKSANAKAN

Tabel 1.1 Perbandingan Persentase capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020-2023 di Desa Sawah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)				Interprestasi
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya capaian target program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan	Persentase capaian rget pelaksanaan program/kegiatan	60%	65%	75%	80%	Cukup Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)				Interprestasi
			2020	2021	2022	2023	
2.	Meningkatnya tindak lanjut atashasil pengawasandan evaluasi masalah	Persentase jumlah temuan hasil pengawasan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	90%	Berhasil
3.	Meningkatnyasarana & Prasarana pendukung operasional yang memadai	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung operasional dalam kondisibaik	80%	80%	90%	95%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)				Interprestasi
			2020	2021	2022	2023	
4.	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Jumlah kualitas pendidikan yang dimiliki	65%	70%	80%	85%	Cukup Berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Pencapaian kinerja target program dan kegiatan didesa sawah dari tahun 2020-2023 meningkat setiap tahun nya karena sarana interprestasi nilai CUKUP BERHASIL seperti ronda malam, posyandu, kerja bakti. Kinerja tidak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi dari tahun 2020-2023 sarana interprestasi nilai BERHASIL seperti linmas, pol pp desa. Meningkatnya sarana & prasarana pendukung oprasional yang memadai dari tahun 2020-2023 sarana interprestasi nilai BERHASIL seperti kantor desa, puskesmas, masjid dan balai desa. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi dari tahun 2020-2023 sarana interprestasi nilai CUKUP BERHASIL seperti tingkat pendidikan, mata pencarian pokok, dan kualitas angkatan kerja.

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Sasaran dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Kegiatan	Sasaran
Meningkat nya capaian target program dan kegiatan yang direncanakan	Adanya Bidan Desa	Memberikan pelayanan posyandu kepada masyarakat.	95 %	95, 8 %
		Membantu menangani persalinan	90 %	
		Menggerakan & membina masyarakat agar tumbuh kesadaran untuk hidup sehat	80 %	
		Melayani keluhan masyarakat di bidang kesehatan	95 %	

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran di atas adalah presentase capaian target program dan kegiatan yang direncanakan tepat waktu dengan 1 program 4 kegiatan . dimana pencapaian kinerja sasaran adalah 95, 8 % atau termasuk dalam kategori interpretasi nilai BERHASIL.

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Sasaran dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Kegiatan	Sasaran
Meningkatnya tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi masalah	Adanya Linmas	✓ Membantu dalam penanggulangan bencana	80 %	90, 5 %
		✓ Membantu keamanan, kententraman, dan ketertiban masyarakat.	90 %	
		✓ Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.	95 %	

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran di atas adalah presentase jumlah temuan hasil pengawasan dan evaluasi yang di tindak lanjuti . dari 1 program 3 kegiatan dimana pencapaian kinerja sasaran adalah 90,5 % atau termasuk dalam kategori interpretasi nilai BERHASIL.

Tabel 1.4 Capaian kinerja sasaran dan kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Kegiatan	Sasaran
Meningkat nya sarana dan prasana pendukung operasional pengawasan yang memadai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasasurat menyurat	98 %	85, 7 %
		Penyediaan jasaSDA	88 %	
		Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	65 %	
		Penyediaan makanan & minuman	85 %	
		Rapat koordinasi & konsultasi luar daerah	80 %	
		Rapat - rapat koordinasi dalam daerah	85 %	

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran diatas dalah presentase capaian target program dan

kegiatan yang direncanakan tepat waktu terdiri dari 1 program 6 kegiatan . Pencapaian kinerja untuk sasaran adalah 885,7 % termasuk dalam kategori interpretasi nilai CUKUP BERHASIL .

Tabel 1.5 Capaian Kinerja Sasaran Dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	
			Kegiatan	Sasaran
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi	BUM Des	Usaha pelayanandan jasa	80%	85, 7 %
		Bisnis sosial pengelolaan sampah	92%	
		Usaha wisata dan Destinasi wisata	75%	
		Usaha produktif pertanian	90%	

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran diatas dalah presentase capaian meningkatnya SDM yang berkualitas tepat waktu terdiri dari 1 program 4 kegiatan . Pencapaian kinerja untuk sasaran adalah 885,7 % termasuk dalam kategori interpretasi nilai CUKUP BERHASIL .

BAB 4

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

A. Definisi manajemen

Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sdm, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Jika ditanya jelaskan fungsi manajemen, maka ada 5 fungsi manajemen yang harus anda ketahui. Fungsi tersebut telah disebutkan oleh Henry Fayol.

Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur sdm, sampai dengan pengendalian. Dalam artikel ini akan kami sebutkan fungsi manajemen yang penting untuk diketahui.

1. Perencanaan

Salah satu 5 fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan.

Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini, terdiri dari 4 tingkatan. Diantaranya adalah pembagian tugas, menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif.

3. Pengarahan

Kita sebutkan fungsi manajemen lainnya yaitu pengarahan atau briefing. Pengarahan juga diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan.

4. Koordinasi

Fungsi-fungsi manajemen yang tak kalah penting adalah bertujuan untuk koordinasi (coordination) atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai.

Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik.

5. Pengendalian

Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah resiko kerugian yang mungkin terjadi. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak.

B. Definisi Pelayanan Publik

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh penyedia pelayanan publik dan diperuntukkan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut mahmudi 2010, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut ratminto & atik septi winarsih 2015 pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. (Wibawa, 2010).

Dapatlah disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan pelayanan baik berupa barang dan jasa yang diperuntukkan kepada warga negara dan penduduk yang diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas kependudukan dan catatan sipil di setiap pemerintahan. Menyelenggarakan pelayanan dasar dengan memiliki visi dan misi yang diarahkan untuk memberikan percepatan kualitas pelayanan publik di masa depan.

C. Manajemen Pelayanan Publik

Penerapan manajemen pelayanan publik di setiap organisasi perangkat daerah (opd) yang menjalankan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dengan berlandaskan pada pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Khaidir (2018,10) menyatakan manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai proses pengaplikasian ilmu dan seni dalam menyusun rencana, pelaksanaan rencana, koordinasi dalam penyelesaian pekerjaan pelayanan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sahuri (2017,1), manajemen pelayanan publik merupakan upaya pengelolaan sejumlah aspek dalam manajemen dalam upaya merancang,

mempersiapkan atau mempersembahkan barang dan jasa kepada masyarakat serta dilakukan evaluasi dan penilaian atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Sejumlah pengertian diatas, kemudian dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan publik diidentikkan dengan upaya penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi-fungsi tersebut yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan menjadi pilar yang diharapkan dapat mengarahkan setiap proses kegiatan yang dilaksanakan para petugas pelaksana atau sang manajer tidak menyimpang dari standar organisasi yang telah ditetapkan.

D. Tujuan Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan publik dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, sehingga memenuhi asa pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, memiliki kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah

berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Adapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Untuk itu, diperlukan perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi.

E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sangat penting agar para penyelenggara pelayanan publik dapat lebih mengenal warganya, termasuk cara berpikir dan kebiasaan hidup warga masyarakatnya, masalah yang dihadapinya, apa yang disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan lain-lain. Kurangnya

partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan menyebabkan kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodir berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dapat menimbulkan kegagalan pada pencapaian tujuan kebijakan.

Peran serta masyarakat atau yang dalam tulisan ini kita sebut dengan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta atau partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Hal ini diatur di pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

F. Pelayanan Publik Di Desa Sawah

Pelayanan disana sering adanya pelayanan umum terdapat 2 bagian yaitu administrasi dan jasa .

- Pelayanan administrasi merupakan jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public ,seperti akta kelahiran, identitas kependudukan, surat tanah , surat kematian, surat cerai,surat tidak mampu, dan sebagainya.

- Pelayanan jasa merupakan jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik ,seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain-lain.

Tabel 1.6 Standar Pelayanan Publik Di Desa Sawah

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	SATUAN KERJA
1	Data dan informasi akta kelahiran	Tersedia	80 %	2018-2023	Bidan Desa
2.	Data identitas penduduk	Tersedia	90 %	2018-2023	Capil
3.	Data dan informasi tanah peron	Belum Tersedia	-	-	-
4.	Data surat kematian	Tersedia	50 %	2019-2023	Sekdes
5.	Data dan informasi surat cerai	Terlaksana	50 %	2015-2023	Sekdes

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	SATUANKERJA
6.	Data dan informasi surat tidak mampu	Tersedia	60 %	2022-2023	Sekdes
7.	Pelayanan Kesehatan	Tersedia	95 %	2010-2023	Bidan Desa
8.	Pelayanan Pendidikan	Tersedia	95 %	1984-2023	Guru
9.	Pelayanan keamanan	Tersedia	90 %	2022-2023	Kades

Dari data yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan pelayanan di desa sawah dari dulu hingga sekarang berkembang 85 % dari seluruh pelayanan . yang di harapkan masyarakat saat ini untuk pencapaian pelayanan yang baik dan kualitas yang sempurna bisa bertahan sampai seterusnya.

Dengan demikian pelayanan publik yang di rasakan masyarakat desa sawah lebih dominan ke sisi positif dari pada sisi negatif yaitu dari segi pelayanan sudah sangat maksimal ,mulai dari pelayanan administrasi dan pelayanan jasa sangat memuaskan dari sebelumnya dan sesuai prosedur petugas nya juga sangat ramah , murah senyum dan profesional .

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inofasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di lakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target program peningkatan pelayanan publik adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah di jangkau) pada instansi pemerintah .
2. Meningkatnya jumlah unit pelayana yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi

pemerintah, dan

3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

BAB 5

KEWIRAUSAHAN SEKTOR PUBLIK

A. Definisi Kewirausahaan Sektor Publik

Kewirausahaan sektor publik adalah gagasan dan instrumen penting bagi pengorganisasian agenda transformatif untuk menghasilkan suatu kondisi masyarakat yang dicita-citakan dengan memberikan visi, kepemimpinan, dan penciptaan kondisi yang memungkinkan sektor swasta bekerja sama dan saling bahu-membahu dengan pemerintah sehingga akan meningkatkan jumlah dan kualitas investasi serta menghasilkan model bisnis yang inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang berkelanjutan. Kewirausahaan sektor publik berperan penting dalam menginisiasi, membentuk, mempercepat agenda pembangunan transformatif yang digerakkan oleh kelompok kelas menengah.

B. Manfaat Kewirausahaan Sektor Publik

Dalam konteks ekonomi, kewirausahaan sektor publik bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui transformasi dari suatu

kondisi lingkungan ekonomi yang status quo menuju ke lingkungan ekonomi yang lebih kondusif dengan melibatkan kegiatan kreatif.

Manfaat kewirausahaan dalam perekonomian

1. Meningkatkan taraf hidup

Saat menerapkan konsep wiraswasta dalam membangun bisnis dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Dapat meningkatkan pendapatan nasional

Manfaat wirausaha indonesia juga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Inovasi menjadi hakikat yang penting di dalam konsep wiraswasta.

3. Dapat menciptakan lapangan kerja

Wirausaha juga memiliki kontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

4. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi bukan hanya mengacu pada peningkatan kemiskinan.

Manfaat adanya para wirausaha, adalah sebagai berikut :

1. Berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya.

2. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

3. Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama.
4. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani.
5. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan.
6. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun dan jujur dalam menjalani pekerjaan.
7. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros.

C. Definisi BUMdes Kewirausahaan

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

BUMDes tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi pemerintah dan dukungan dari masyarakat desa. Indikator

keberhasilan BUMDes dapat dilihat melalui meningkatnya laba/aset secara konsisten, meluasnya cakupan konsumen, kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah serta masyarakat desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Swandari et al. (2017) berpendapat bahwa salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro desa misalnya Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Ibnu & Endaryanto (2018); Ihsan (2018); Jaryono & Tohir (2019); Lestari (2017) berpendapat jika keberhasilan BUMDes didukung oleh kualitas sumber daya yang baik seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial.

D. Manfaat Kewirausahaan

Manfaat BUMDes BUM Desa memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. BUM Desa, juga bisa berperan sebagai pengelola

keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUM Desa bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas. Secara garis besar BUM Desa memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik. 1. Komersil Sebagai lembaga komersil BUM Desa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi. 2. Pelayanan publik BUM Desa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUM Desa juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial. Dari banyaknya manfaat yang di terima dari pendirian BUM Desa, maka desa akan mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk seluruh masyarakat desa-desa di Indonesia segera membentuk BUM Desa dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian desa.

E. Macam-Macam BUMdes Di Desa Sawah

Desa sawah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yang sudah berdiri sejak tahun 2018 tetapi sempat vacuum di pemerintahan sebelumnya, karena kendala dana dan SDM

yang belum terpenuhi. Pada tahun 2022 BUMDes kembali berjalan semenjak kepemimpinan baru yang di pimpin oleh Bapak HERMAN PALANI sebagai kepala desa sawah. Seluruh perangkat dan pengurus BUMDes di perbarui jabatannya.

➤ Pembuatan BUMDes Di Utamakan Untuk :

1. Kerajinan Lokal

Kerajinan Lokal ialah produk kerajinan yang dibuat dan di produksi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar kita dengan adanya kerajinan lokal bisa menghasilkan pendapatan masyarakat karena nantinya produk kerajinan yang dihasilkan bisa dijual. Serta membuka lapangan pekerjaan yang baru karena apabila usaha kerajinan tersebut semakin besar maka di butuhkan lebih banyak lagi perajin dan bisa menambah nilai guna di desa sawah.

Diantaranya memanfaatkan barang bekas, dapat mengurangi perilaku konsumtif. Dimana barang bekas yang tidak terpakai, didaur ulang menjadi baranglain yang lebih berguna. Sehingga dari pada terus membeli barang yang tidak digunakan, kita lebih kreatif memaksimalkan barang yang ada. Dengan mendaur ulang sampah kita dapat

mengurangi sampah, dan mencegah pencemaran lingkungan.

Contohnya membuat Bunga dari kain bekas dan kantong plastik dengan bahan:

- a. Kain bekas
- b. Kantong Plastik
- c. Kawat Kecil dan Besar
- d. Gunting
- e. Lem Tembak
- f. Benang
- g. Lilin
- h. Tang

Cara membuat :

- a. Putarkan kawat berbentuk lingkaran bertangkai (berukuran kecil sedang & besar)
- b. Gulung kawat menggunakan kantong plastik sesuai pola lingkaran .
- c. Tempelkan kawat tersebut ke kain bekas menggunakan lem tembak .
- d. Setelah digunting semua kita rangkai satu persatu sehingga berbentuk bunga menggunakan benang jahit .

Rincian biaya :

1. Kawat kecil Rp. 20.000
2. Kawat besar Rp. 30.000
3. Lem tembak Rp. 10.000/Pcs
4. Benang jahit Rp. 2.000 Harga 1 Bunga Rp. 75.000



Gambar 1.8 Foto Kegiatan BUM Des membuat bunga dari kain dan plastik bekas



Gambar 1.9 Foto Langsung Hasil pembuatan bunga dari kain dan plastik bekas

2. Makanan Khas

Makanan khas adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan masyarakat setempat. Dan sebagai ciri khas dari daerah itu sendiri menjadi budaya turun temurun, dan menjadi sumber mata pencarian penduduk disekitar untuk dijual di pasaran. Desa Sawah memiliki berbagai makanan dan cemilan khas salah satunya saos pedas, permen labu siam, krupuk beras, dan engkakkacang.



Gambar 2.1

Sumber : Dokumentasi penulis

- a) Permen labusiam merupakan salah satu makanan khas desa sawah dibuat menggunakan labusiam dan gula pasir



Gambar 2.2

Sumber : Dokumentasi penulis

- b) Saus tomat merupakan salah satu makanan khas desa sawah dibuat menggunakan seperti tomat, cabe merah dan cabe setan.



Gambar 2.3

Sumber : Dokumentasi penulis

- c) Engkak kacang merupakan salah satu makanan khas desa sawah engkak kacang dibuat menggunakan tepung ketan, kacang, gula merah, gula pasir, mentega dan kelapa goreng sebagai bahan utamanya.



Gambar 2.4

Sumber : Dokumentasi penulis

- d) Kerupuk beras merupakan salah satu makanan khas desa sawah dibuat menggunakan seperti beras, masako, ketumpar, sasa dan garam.

BAB 6

MANAJEMEN BENCANA

A. Definisi Manajemen Bencana

Pengertian Bencana

Definisi tentang bencana yang pada umumnya menjelaskan tentang Karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan, dan lain - lain serta kebutuhan yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

Sedangkan definisi menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal I Angka I : "Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang

mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Pengertian Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa sruktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

Pengertian Manajemen Bencana

Menurut University Of Wisconsin, manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu oang yang renta bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana.

B. Tujuan Dan Faktor Manajemen Bencana

Menurut Warfield, Manajemen Bencana Mempunyai Tujuan:

- 1) Mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana,
- 2) Menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana,
- 3) Mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Bencana yang disebabkan faktor sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

C. Macam-Macam Bencana Sosial

1. Konflik Sosial

Suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial,

budaya dan ekonomi di mana biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama maupun ras (SARA).

2. Aksi Teror

Aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan. Sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup hingga fasilitas publik internasional.

3. Sabotase

Tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan maupun penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, namun dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur dan struktur ekonomi.

D. Cara Mengatasi Bencana Sosial

1. Menumbuhkan kesadaran diri kita bangsa yang dibangun dengan gotong royong, saling bahu membahu dalam kesulitan dan setiap warga negara menerapkan pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara.
2. Mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Dikarenakan hal ini merupakan dari pencegahan sejak dini untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan mencegah menjadi pelaku tindakan kriminal.
3. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multi kultural, seperti sekolah, pengajian dan organisasi masyarakat.
4. Memberikan pengamanan terhadap objek-objek vital di lokasi-lokasi strategis.
5. Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat. Hal ini akan sangat ampuh untuk memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak mengulangi kembali tindakannya.
6. Jika kita berada pada posisi yang dianggap dirugikan atau dicurangi, kita dapat menempuh jalur hukum dengan melapor kepada pihak terkait.

7. Setelah semua proses dan jalur hukum telah ditempuh, harus saling menerima hasil atau keputusannya.

E. Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana

Peran Masyarakat sangat dibutuhkan dan mendapat tempat yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran akan bencana, baik sebelum terjadi, pada saat dan setelah bencana terjadi. Kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana untuk mewujudkan kampung siaga bencana seperti membuat kegiatan pada tahap Pra Bencana Kegiatan pra bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini.



Gambar 2.5
www.detik.com

Desa sawah merupakan desa yang jarang terjadi bencana alam tetapi sering terjadi bencana sosial. Pada tahun 2018 marak terjadinya pembegalan motor, pencopetan, dan pemalakan mobil biasanya anak-anak remaja dan lansia yang terlibat dalam peristiwa tersebut pada sore dan malam hari. Pada pemerintahan bapak H. JONCIK MUHAMMAD, S. Si.SH.MM.MH telah dibentuknya pol pp untuk 6 desa yang beranggotakan 12 orang, setiap harinya petugas pol pp bergantian menjaga keamanan desa.

Penyebab mengapa adanya kejahatan begal motor di desa sawah berdasarkan informasi dari petugas pol pp yaitu karena pengaruh minuman alkohol, obat-obatan, narkoba, kebutuhan ekonomi. Menurut Edwin M. Lemert (1912:12), seseorang menjadi penyimpang karena proses labelling yang diberikan masyarakat kepadanya. Maksudnya adalah pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer. misalnya pencuri, penipu, pemerkosa, pemabuk, dan sebagainya.

Solusinya polisi harus lebih tegas dalam menangani dan menindak pembegalan motor secara lebih luas dan masif. Adanya operasi pemberantasan secara “serius dan besar” seperti memberikan shock therapy semacam sosialisasi terhadap remaja yang mayoritasnya anggota begal motor

bahwa aksi pembegalan adalah tindakan kriminal yang uu peraturannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab aturan biasanya dilanggar, akibat minimnya sosialisasi pihak keamanan negara danefeknya akan menekan angka kejahatan itu untuk selamanya karena para orang tua juga minim mensosialisasikan terhadap anaknya bahwa begal merupakan tindakan yang buruk di mata masyarakat. Sesuai pada pandangan dasar teori sosialisasi adalah bahwa penyimpangan sosial merupakan produk dari proses sosialisasi yang kurang sempurna atau gagal. Menurut Albert Bandura dan Richard H. Walters (2003:14) misalnya, anak-anak belajar perilaku menyimpang dengan mengamati dan meniru orang lain memiliki perilaku menyimpang khususnya, mereka mengamati dan meniru orang yang dekat dengannya. Adapun harapan masyarakat untuk desa sawah keamanan akan terus berlanjut dan terjaga dengan adanya petugas sat pol pp dan limas.

Salah Satu Bencana Alam Di Desa Sawah

Bupati Pimpin Apel Siaga Bencana Banjir dan Tanah Longsor



Gambar 2.6

<https://empatlawangkab.go.id/v2/bupati-pimpin-apel-siaga-bencana-banjir-dan-tanah-longsor/>

Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, pimpin Apel Siaga Bencana Banjir dan Tanah Longsor, di lapangan Kantor Bupati Empat Lawang. Apel tersebut juga dihadiri Forkopimda Empat Lawang dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Empat Lawang dan seluruh Camat se Kabupaten Empat Lawang. Bupati berharap, semua pihak dan seluruh masyarakat dapat bekerjasama untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi ataupun dalam rangka pencegahan. “Untuk kegiatan pencegahan ini, sosialisasi perlu sekali kita tingkatkan agar masyarakat kita peduli dan sadar dengan lingkungan supaya kedepan bencana

di bumi Empat Lawang bisa ditanggapi dan teratasi secara efektif dan sebaik-baiknya,” ungkap Bupati.

Karena sekarang memasuki musim penghujan, Bupati juga mengingatkan kepada BPBD, Damkar dan OPD terkait lainnya, untuk menyiapkan dan mengantisipasi terjadinya bencana. Bahkan pihak kecamatan juga sudah diinstruksikan. Terkait masalah logistik, Kabupaten Empat Lawang sudah menyiapkan sesuai kemampuan. Bahkan stok pangan sudah disiapkan karena sekarang memang bulan bencana, rawan banjir, dan rawan longsor.

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam pasal 12 ayat (1) huruf 'e' menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah

dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Sebagai wujud dari usaha pemenuhan kebutuhan tersebut, Kepala desa sawah dan BPBD Kabupaten empat lawang melakukan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat desa sawah. Materi yang disampaikan oleh kepala desa meliputi informasi mengenai bencana, daerah rawan bencana, ancaman bencana, kerentanan, kapasitas masyarakat desa sawah serta kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana dan upaya-upaya yang telah dan harus dilakukan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Cara Menghindari nya

Untuk menghindari dari tanah longsor, kepala desa sawah wajib mengetahui cara dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Memang kita sebagai manusia tidak bisa menghentikan terjadinya bencana secara 100 persen, namun setidaknya kepala desa dan masyarakat harus melakukan sosialisasi sejak dini akan mengurangi resiko dan dampak yang akan ditimbulkan.

Berikut adalah cara atau upaya yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara mencegah tanah longsor :

1. Jangan Membuat Kolam Atau Sawah Di Atas Lereng

Ketika kita akan membuat kolam atau sawah diatas lereng sangat diupayakan untuk tidak membuatnya karena akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor. Dengan adanya tebing curam terlebih pada lahan gundul sementara itu diatasnya juga ada kolam dan sawah yang dipenuhi air tentu membuat daya hidrostatika semakin kuat menekan permukaan tanah sehingga tanah rentan untuk tergeser merubah dan mengakibatkan terjadinya longsor. Keadaan gawat akan terjadi jika semua air sawah atau kolam tiba tiba menghilang karena habis terserap ke dalam tanah. Hal itulah yang sering terjadi sesaat sebelum terjadinya bencana.

2. Tidak Mendirikan Rumah Di Bawah Tebing

Untuk masalah pembuatan rumah carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Jika lokasi sekitar memang berbukit, pilihlah lokasi yang kiranya aman dari jangkauan luruhan tanah jika terjadi longsor.

3. Tidak Mendirikan Bangunan Di Sekitar Sungai

Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah ada di sekitar sungai. Dan jika saat proses terjadinya hujan pada musim hujan dimana aliran sungai sangat deras dan volumenya besar maka dengan mudah terjadinya erosi.

4. Lakukan Upaya Preventif

5. Dengan cara mengecek apakah terdapat retakan pada tanah, jika ditemukan maka segera tutup celah retakan itu dengan tanah lempung supaya tidak banyak air masuk kedalam celah retakan tersebut. Selain itu dengan menjaga kelestarian vegetasi di sekitar tebing

juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang terbukti efektif.

6. Memberikan penyuluhan kepada Masyarakat

Terkait tanah longsor dan bahaya yang mengikutinya. Seringkali penyebab rusaknya kawasan hutan sekitar lereng karena dilakukannya penebangan pohon oleh masyarakat sekitar yang memang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai dampak negatif yang akan terjadi. Dengan memberikan penyuluhan akan membuka wawasan dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana.

7. Harus Ada Intervensi Dari Pemerintah

Upaya penyuluhan kepada masyarakat desa sawah akan semakin tepat sasaran ketika dibuat peraturan tegas terkait pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, harus ada upaya campur tangan dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membuat aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Dengan demikian akan menekan resiko terjadinya kerusakan hutan di area lereng.

Salah Satu Bencana Sosial Di Desa Sawah

Tim Elang Satreskrim Polres Empat Lawang berhasil menangkap pelaku perampokan terhadap pengemudi mobil Toyota Yaris, Kamis (6/4/2023). Polisi berhasil mengamankan 2 dari 6 orang pelaku dimana diantaranya perempuan. Kedua pelaku yakni Lincih (22) dan Santri (40) yang mana keduanya merupakan warga Lorong Sawah Tebing Tinggi dan Babatan Kecamatan Lintang Kanan, kabupaten empat Lawang. "Kita sudah berhasil mengamankan dua pelaku perampokkan warga Lampung yang terjadi Selasa (4/4/2023)," ujar Kapolres Empat Lawang AKBP Helda Prayitno melalui Kasih Humas Kompol Hidayat, Kamis (6/4/2023).

Dikatakan Hidayat untuk kronologi kejadian perampokan yang dialami Andri Warga Tanggamus, Lampung, Selasa (4/4/2023), saat itu korban bertemu dengan pelaku Lincih di di hotel Musi raya di Tebing Tinggi sekitar pukul 19.30 WIB. Lalu korban diajak oleh pelaku Lincih ini ke desa Bayau kecamatan Pendopo untuk menemui teman lincih. Namun sesampai perbatasan Tebing Tinggi Pendopo saat memasuki kawasan pendopo, pelaku Lincih ini menelpon temannya. "Nahasnya mobil Toyota Yaris yang dikendarai korban mengalami pecah ban. Saat pecah ban di TKP tiba - tiba keluar

empat orang dimana salah satunya menodongkan senjata api," ujarnya.

Selain itu pelaku lain ada yang mengikat tangan korban dan menutup mulut korban dengan lakban. Kemudian para pelaku mengambil uang di dalam dompet yang berisikan 600ribu dan mengambil ATM korban dan meminta nomor pinnya. Setelah mengetahui pin ATM korban, para pelaku langsung menguras uang korban dan korban ditinggalkan para pelaku di kawasan perbatasan empat Lawang tepatnya di kebun persawitan desa Sidomakmur, Kabupaten Lahat. "Dua diamankan tiga masih DPO, untuk barang bukti sudah kita amankan juga berupa 1 unit mobil Toyota Yaris, dan barang bukti lainnya, sementara kasus ini masih dalam pengembangan petugas," pungkasnya.

BAB 7

ADVOKASI KEBIJAKAN

A. Definisi Advokasi Kebijakan

Pengertian Advokasi Kampus

Advokasi merupakan serangkaian gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka sistem yang ada. Advokasi berkaitan dengan tugas subdit advokasi peraturan desa terhadap kewenangan peraturan yang terkait dengan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa.

Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan :

- Menurut Notoadmodjo (Zulyadi Teuku, 2004: Hal 64) advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan .
- Menurut Julie Strirling advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang

terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

> Menurut James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

> Penerapan Kebijakan

Adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

> Kebijakan Pembangunan Desa

Dengan Amanat UU No. 6/2014 Tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2022, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan bpd, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, serta penguatan masyarakat desa.

> Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal: pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, drainase, tpt).
2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan,sekolah, dan pusat pemerintahan.
4. Pembentukan dan pengembangan bumdesa serta

penguatan permodalan bumdesa.

B. Tujuan Advokasi

Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah mengubah suatu sistem/ lembaga/ program/ kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan melakukan tindakan nyata atas solusi masalah adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah memberi kepedulian alternatif solusi masalah untuk melakukan tindak lanjut kegiatan.

Secara umum, tujuan advokasi peraturan desa adalah untuk merealisasikan hak-hak desa dengan mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada desa. Secara khusus tujuan advokasi peraturan desa adalah untuk melakukan advokasi regulasi agar memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi terfasilitasinya proses pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tujuan Advokasi Melakukan Advokasi Terhadap Kewenangan Desa Regulasi Yang Terkait Dengannya Agar Memberikan Ruang Dengan Seluas Luasnya Bagi Terfasilitasinya Proses Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Serta Merealisasikan

Hak Hak Desa Dengan Mendorong Kebijakan Kebijakan Yang Lebih Baik Dan Berpihak Kepada Desa Sehingga Desa Menjadi Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian.

C. Jenis dan Strategi Advokasi

Jenis advokasi Menurut Schneider yang dikutip dari e-paper scribd oleh Hartiwi Parwoto, jenis-jenis advokasi secara umum antara lain:

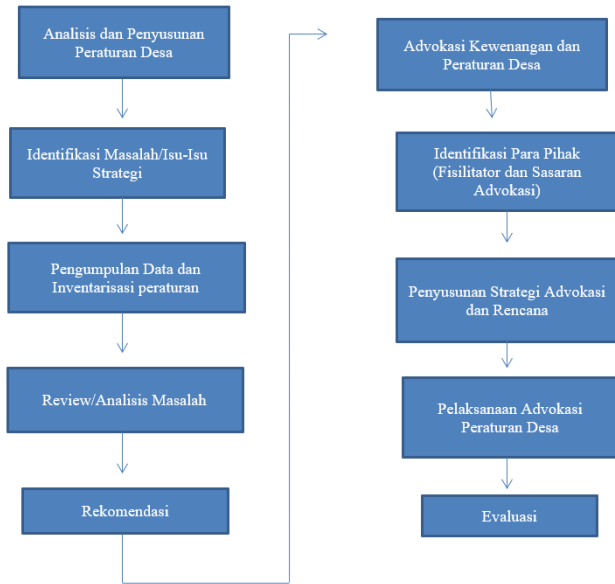
- Advokasi klien merupakan jenis advokasi yang tujuan akhirnya untuk berjuang memenangkan suatu "masalah" terhadap suatu sistem atau lembaga.
- Advokasi Masyarakat Advokasi masyarakat adalah jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh pelayanan yang sesuai.
- Advokasi Legislatif Advokasi legislatif yaitu jenis advokasi yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang.
- Advokasi Administratif Jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administratif. Di mana, advokasinya bisa dilakukan melalui lembaga.

Strategi dalam Melakukan Advokasi melibatkan macam strategi. Berikut merupakan beberapa contoh strategi

advokasi:

- a. Membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput (grassroots).
- b. Misalnya perserikatan, organisasi, federasi, dan pengayom lainnya.
- c. Mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan parta politik.
- d. Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan.
- e. Melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi.
- f. Melewati aksi-aksi peradilan.
- g. Mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi

Kebijakan dan strategi advokasi kewenangan dan penyusunan peraturan desa



Strategi Implementasi di desa dalam rangka advokasi kewenangan dan penyusunan peraturan desa

- Mendorong, memfasilitasi kemampuan/kapasitas kepala desa, aparat dan masyarakat desa.
- Penegasan komitmen (kemauan) yang kuat para pemimpin desa
- Memotivasi warga masyarakat agar terus proaktif menyampaikan aspirasinya
- Menyediakan wadah wadah (oorganisasi advokasi) masyarakat yang semarak
- Menguatan forum warga dan rembuk desa yang dan berkelanjutan

- Mendorong sinergitas antara Pemes, BPD dan masyarakat saling percaya dan bekerjasama.

D. Partisipasi masyarakat dalam melakukan advokasi

Menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan. Pada akhirnya, peraturan yang telah disusun dapat diterapkan di Desa Sawah sehingga kedepannya mengurangi sampah yang berserakan dan luapan air hujan jika adanya selokan / got di Desa Sawah .

Partisipasi masyarakat Desa Sawah tidak hanya berhenti pada proses advokasi kebijakan publik. Masyarakat Desa Sawah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi guna menjaga kelestarian dan peduli lingkungan.

Desa sawah memiliki permasalahan terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya belum ada saluran pembuangan air atau yang biasa disebut selokan/got.



Gambar 2.7 Foto Langsung Kawasan yang belum memiliki selokan/got

Saluran air atau yang disebut juga dengan selokan merupakan hal yang penting dalam mengantisipasi terjadinya luapan air hujan, sehingga air hujan dapat terarah dan tidak menimbulkan masalah baik terhadap lingkungan dan kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, dan atap. Sering sekali kita menjumpai selokan atau got yang sudah tidak berfungsi sebagai mana mestinya, selokan yang sudah bercampur aduk menjadi satu dengan sampah, sampah yang

terkandung pun beraneka ragam, mulai dari sampah botol-motol minuman, kemasan plastik, kemasan makanan dan lain sebagainya, sungguh sangat memilukan, sadar atau tidak sadar dampak dari hal tersebut membawa bencana bagi lingkungan sekitar.

Banyak dari kita mengabaikan manfaat dan pentingnya selokan atau got, bahkan apabila terdengar kata got yang terbesit dalam benak kita adalah “got menjijikan dan kotor”. Bagaimana jadinya jika dalam suatu pemukiman penduduk tidak ada got? Atau got tersebut tidak berfungsi dengan baik, banjir melanda sudah menanti didepan kita. Sampah packaging makanan, botol minuman dan jenis sampah lainnya yang berserakan akan terbawa oleh air hujan hal itu terjadi karena banyak dari kita yang belum peduli terhadap lingkungannya sendiri, mulai saat ini mari manfaatkan fungsi selokan sebaik-baiknya dengan cara melakukan rutinitas kebersihan bersama, seperti membersihkan sampah yang berserakan ditempat umum, membersihkan sampah yang menyumbat pada selokan, dan mulailah membuang sampah pada tempatnya.

Saluran tersumbat disebabkan karena beberapa hal seperti :

- Kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan misalnya, pada saluran selokan tersumbatan terjadi

karena tumpukan sampah , endapan plastik-plastik, dan tumbuhnya rumput-rumput.

- Terjadinya jalan rusak karena tidak adanya selokan/siring di pinggir-pinggir jalan sehingga tidak ada nya akses air dari pembuangan rumah warga dan menyebabkan air itu mengalir ke jalanan tersebut.

Tujuan dan Manfaat adanya selokan/got :

- Untuk memperlancar air pada musim hujan.
Hujan dan air mengikuti hukum alam, kita tidak bisa menyalahkan hujan atau air sebagai suatu permasalahan seperti banjir. Secara alamiah, hujan akan turun di musim hujan.. Berpindahnya air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah bisa dengan cara mengalir di atas permukaan tanah, atau meresap ke dalam tanah. Banjir terjadi akibat terjadinya genangan di suatu kawasan. Genangan banjir dapat terjadi ketika air hujan tidak dapat meresap dan mengalir secara lancar Akibatnya air meluber dan menggenangi permukiman

Jadi, secara umum cara mengatasi banjir adalah dengan mengelola fenomena alamiah air yang mengalir dan meresap. Semakin banyak air diresapkan ke dalam tanah, dan sisanya dialirkan sampai ke laut. Ketika

pengelolaan resapan dan aliran air tidak baik, semakin besar volume air yang mengalir di permukaan tanah. Seperti di kota besar, area tangkapan air semakin sempit, sehingga semakin kecil volume air yang bisa meresap ke dalam tanah. Akibatnya volume air yang mengalir di permukaan tanah menjadi lebih besar.

- Saluran drainase horizontal yang dapat menampung air hujan yang mengalir di permukaan tanah tersebut. Sistem saluran drainase di atas selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar, yaitu ke badan air atau sungai, dan akhirnya terbuang ke laut. Sesuai dengan prinsip sebagai jalur pembuangan maka pada waktu hujan air yang mengalir di permukaan diusahakan secepatnya dibuang, agar tidak menimbulkan genangan-genangan yang dapat mengganggu aktivitas di permukiman.
- Untuk menjaga erosi tanah pada pemukiman penduduk, karena pada saat ini belum tersedia saluran air. Lambatnya penanganan mengenai erosi tanah membuat semakin rusak ekosistem disekitar terjadinya erosi tersebut. Cara ini adalah dengan membuat teras demi teras seperti tangga pada lahan yang miring sehingga ketika hujan turun air tidak langsung mengalir begitu saja sehingga proses terjadinya pengikisan tanah bisa ditekan seminimal mungkin.

- Untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bagi setiap manusia. Karena tubuh manusia yang sehat berasal dari lingkungan yang sehat dan bersih. Cara yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga dan membersihkan lingkungan yang bisa dilakukan. Salah satu yang paling utama adalah tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan, dan memisahkan sampah-sampah sesuai jenisnya.
- Secara garis besar, manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain:
 - Tingkatkan kualitas kesehatan
 - Terbebas dari risiko banjir karena tidak ada sampah yang menghambat saluran air
 - Lingkungan lebih asri, aman, bersih, nyaman, dan sejuk
 - Tersedia banyak air bersih yang aman untuk dikonsumsi
 - Terhindar dari risiko penyakit menular akibat pertumbuhan bibit penyakit seperti demam berdarah dan lainnya.
- Untuk meningkatkan Kesehatan lingkungan.
Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan

salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar.

Adapun dampak yang ditimbulkan apabila selokan tidak bersih. Selokan yang mampet akan menimbulkan masalah lingkungan. Misalnya, air jadi tidak bias mengalir. Selain itu, selokan yang mampet akan kotor dan menimbulkan bau. Hal itu bisa mengganggu kenyamanan dan menimbulkan masalah kesehatan.

BAB 8

PERILAKU ORGANISASI

A. Perilaku Organisasi

Pengertian perilaku organisasi adalah studi akademis tentang bagaimana orang berinteraksi dalam kelompok. Prinsip-prinsip studi perilaku organisasi diterapkan terutama dalam upaya untuk membuat bisnis beroperasi lebih efektif. Studi tentang perilaku organisasi berakar pada akhir 1920-an, ketika perusahaan listrik barat meluncurkan serangkaian studi yang sekarang terkenal tentang perilaku pekerja di pabrik Hawthorne Works Di Cicero, Illinois. Pekerja dapat dibuat menjadi lebih produktif jika lingkungan mereka ditingkatkan dengan pencahayaan yang lebih baik dan perbaikan desain lainnya. Yang mengejutkan mereka, para peneliti menemukan bahwa lingkungan kurang penting daripada faktor sosial. Lebih penting, misalnya, bahwa orang bergaul dengan rekan kerja mereka dan merasa bos mereka menghargai mereka. Temuan awal tersebut mengilhami serangkaian studi luas antara tahun 1924 dan 1933.1 mereka termasuk efek pada produktivitas istirahat kerja, isolasi, dan pencahayaan, di antara banyak faktor lainnya. Efek hawthorne yang menggambarkan bagaimana perilaku subjek tes dapat

berubah ketika mereka tahu bahwa mereka sedang diamati— adalah studi paling terkenal tentang perilaku organisasi. Penelitian hawthorne dikreditkan untuk memvalidasi perilaku organisasi sebagai bidang studi yang sah, dan itu adalah dasar dari sumber daya manusia (hr) profesi seperti yang kita kenal sekarang.

B. Tujuan Dan Manfaat Perilaku Organisasi

Para Pemimpin Studi Hawthorne memiliki beberapa gagasan radikal. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menggunakan teknik pengamatan ilmiah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kerja seorang karyawan, dan mereka tidak memandang pekerja sebagai sumber daya yang dapat dipertukarkan. Pekerja, menurut mereka, unik dalam hal psikologi dan potensi kecocokan mereka di dalam perusahaan. Selama tahun-tahun berikutnya, konsep perilaku organisasi melebar. Dimulai dengan perang dunia ii, para peneliti mulai berfokus pada ilmu logistik dan manajemen. Berkembang menjadi teori modern tentang struktur bisnis dan pengambilan keputusan.

Manfaat Perilaku Organisasi

- Berfungsi sebagai peta kehidupan anggota di dalamnya
- Menyelenggarakan penelitian sistematis yang

membantu memahami danmemprediksi kehidupan organisasi di masa mendatang.

- Membantu setiap individu membangun pemahaman atas perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi guna memperkuat hubungan interpersonal satu sama lain.
- Membantu manajer dalam memahami dan mempengaruhi lingkungan, berikut kejadian dan masalah dalam organisasi.
- Sebagai tindakan mencegah terjadinya masalah dalam organisasi.
- Menanamkan motivasi dasar bagi manajer agar mampu mengarahkan dan mengontrol bawahan secara efektif.
- Memelihara hubungan industrial perusahaan

Tujuan Perilaku Organisasi

- Para pemimpin Studi Hawthorne Memiliki beberapa gagasan radikal. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menggunakan teknik pengamatan ilmiah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kerja seorang karyawan, dan mereka tidak memandang pekerja sebagai sumber daya yang dapat dipertukarkan. Pekerja, menurut mereka, unik dalam hal psikologi dan potensi kecocokan mereka di dalam perusahaan. Selama

tahun-tahun berikutnya, konsep perilaku organisasi melebar. Dimulai dengan perang dunia ii, para peneliti mulai berfokus pada ilmu logistik dan manajemen.

- Studi oleh Carnegie School pada 1950-An Dan 1960-An memperkuat pendekatan rasionalis ini untuk pengambilan keputusan saat ini, studi tersebut dan studi lainnya telah berkembang menjadi teori modern tentang struktur bisnis dan pengambilan keputusan.
- Batas baru perilaku organisasi adalah komponen budaya organisasi, seperti bagaimana ras, kelas, dan peran gender memengaruhi pembangunan dan produktivitas kelompok. Studi-studi ini memperhitungkan cara-cara di mana identitas dan latar belakang menginformasikan pengambilan keputusan.
- Program akademik yang berfokus pada perilaku organisasi ditemukan di sekolah bisnis, serta di sekolah pekerjaan sosial dan psikologi. Program-program ini mengambil dari bidang antropologi, etnografi, dan studi kepemimpinan, dan menggunakan model kuantitatif, kualitatif, dan komputer sebagai metode untuk mengeksplorasi dan menguji gagasan.
- Tergantung pada programnya, seseorang dapat mempelajari topik tertentu dalam perilaku organisasi atau bidang yang lebih luas di dalamnya. Topik khusus

yang dibahas meliputi kognisi, pengambilan keputusan, pembelajaran, motivasi, negosiasi, kesan, proses kelompok, stereotip, dan kekuatan dan pengaruh. Area studi yang lebih luas meliputi sistem sosial, dinamika perubahan, pasar, hubungan antara organisasi dan lingkungan mereka, bagaimana gerakan sosial mempengaruhi pasar, dan kekuatan jaringan sosial.

C. Strategi Perilaku Organisasi

Sebagaimana keilmuan lain, perilaku organisasi mempunyai landasan filosofi yang menjadi konsep dasar ilmu ini. Apalagi, perilaku organisasi berkaitan erat dengan manusia. Adapun konsep dasar yang diusung adalah:

- **Hakikat Manusia**

Mencakup pemahaman terkait perbedaan individu, diri individu sepenuhnya, dan perilaku termotivasi. Perilaku yang termotivasi merujuk pada bagaimana individu berperilaku karena adanya dorongan yang berasal dari suatu kebutuhan. Dalam penyelenggaraan organisasi, motivasi harus ada agar individu tergerak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

- **Hakikat Organisasi**

Mencakup pemahaman tentang sistem sosial, karena

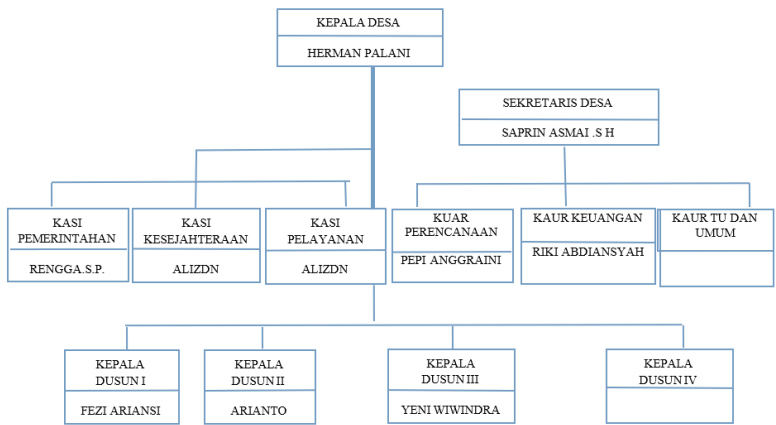
organisasi merupakan sistem sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama. Lalu, ada kepentingan bersamayang menegaskan ada prinsip kesalingan antara individu dan organisasi. Individu membutuhkan Organisasi Dan Organisasi Membutuhkan Individu Agar Bisa Maju Bersama.

D. Partisipasi Dalam Perilaku Organisasi

Partisipasi Dalam Organisasi Menekankan Pada Pembagian Wewenang Atau Tugas-Tugas Dalam Melaksanakan Caranya Dengan Maksud Meningkatkan Efektif Tugas Yang Diberikan Secara Terstruktur Dan Bertambah Jelas.

Berikut Contoh Partisipasi Dalam Bentuk Susunan Organisasi Perangkat Desa:

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DESA SAWAH



KEWENANGAN DESA

Kepala Desa

Kepala Desa pemimpin tertinggi dalam sebuah pemerintah desa. Seorang kepala desa hanya menerima koordinasi dari camat, akan tetapi hal tersebut bukan sepertisebuah tanggung jawab kepada camat. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun masa kerja dan dapat diperpanjang untuk satu kali jabatan lagi.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa dapat dilihat pada UU 2014 Pasal 26-30

Kewajiban kepala desa :

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Melaksanakan kehidupan yang demokrasi.
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan administrasi pemerintah desa dengan baik.

PERANGKAT DESA

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Kewenangan perangkat desa dapat dilihat pada UU 2014 pasal 48-53 Kewajiban Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan.

- Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Lembaga Adat Desa

UU Desa mengatur tentang Lembaga Adat Desa. Keberadaan lembaga tersebut di desa adat menjadi bagian tersendiri dalam memberikan peran dan fungsinya dalam mengembangkan adat istiadat.

Pasal 95

- Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

- Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial dan lingkungan, tata ruang serta arsitektur. Program Pemajuan Kebudayaan Desa adalah mendukung proses dan mewujudkan inisiatif pemajuan kebudayaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Yang memiliki tiga tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu Temu Kenali Potensi, Pengembangan, dan Pemanfaatan.

Salah satu adat istiadat dan budaya yang masih kental dan masih di junjung tinggi oleh warga masyarakat di pedesaan terutama desa sawah adalah sebuah

- Tari 7 bidadari, Dalam tarian ini diceritakan kisah dari tujuh bidadari yang turun dari langit ke Pemandian yang terletak di Desa Sawah Empat Lawang yakni pemandian Puyang Putri.
- Kuntau daerah(macan belang),Kuntau di Desa sawah merupakan salah kuntau warisan leluhur sejak zaman napak tilas Serunting Dakti atau legenda Si Pahit Lidah, biasanya akan ditampilkan pada berbagai acara seperti acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, hingga acara penyambutan wisatawan yang berkunjung ke Desa Sawah
- Dikir atau yang disebut robana biasanya dimainkan pada saat acara sedekahan, pengajian, dan selamatan.

BAB 9

PEMBANGUNAN REGIONAL

A. Definisi Pembangunan Regional

Pembangunan regional adalah usaha meningkatkan kualitas kehidupan maupun kualitas lingkungan, sector dan jangkauannya sangat luas. (Sumaatmaja, 1989:49) menurut sumber lain, pembsngunan regional ialah strategi pemerintahan nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi perkembangan kearah yang kehendaki. Pembagunan regional adalah strategi pemerintah nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannnya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi perkembangan kearah yang lebih baik.

B. Tujuan Dan Manfaat Pembangunan Regional

1. Kesejahteraan masyarakat; dengan adanya pembangunan wilayah tentunya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini tak lepas dari

program pemerintah yang harus berorientasi pada pembangunan, dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Meningkatkan pendapatan perkapita, sebagai upaya dalam menciptakan setidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi pokok pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri atau status bagi yang bekerja.
3. Adanya pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau meningkatkan pendapatan.
4. Terciptanya stabilitas harga atau price stability yaitu untuk menciptakan rasa aman atau tenteram dalam perasaan masyarakat. Karena harga yang tidak stabil tentu akan membuat masyarakat merasa khawatir.

Manfaat Pembangunan Regional

1. Pada aspek makro dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Contohnya pada pemerintah pusat dalam melihat potensi masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Masing-masing wilayah memiliki keunggulan atau

potensi yang berbeda. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda untuk masing-masing daerah.

2. Pada aspek mikro dilihat dari sudut pandang yang lebih sempit atau kecil. Contohnya adalah membantu seorang perencana wilayah atau planner dalam menentukan di bagian wilayah mana suatu kegiatan atau proyek sebaiknya dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan tersebut berguna untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas antara lain melalui pembangunan infrastruktur, modal manusia atau peningkatan sdm (sumber daya manusia), dan keterbukaan perdagangan.

C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan.

Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang. Salah satu hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pemerintah, tanpa dukungan dari masyarakat pembangunan tersebut tidak berhasil.

Dusseldrop, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

D. Potensi Desa

Potensi desa adalah bagian dari pada kekayaan yang dimiliki oleh setiap unsur desa dalam mengembangkan sekaligus memajukan wilayahnya. Sehingga fungsi desa dalam hal ini bukan hanya sebagai tempat tinggal namun juga sebagai setraldari pada proses terjadinya pembangunan.

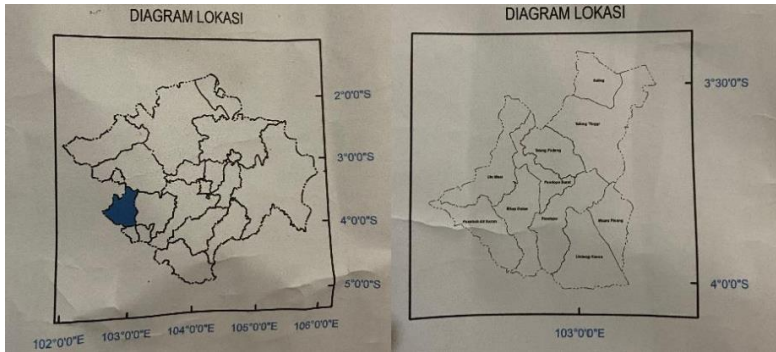
1. Potensi Fisik Desa

Potensi Fisik Desa adalah segenap sumber daya alam yang terdapat di desa dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran, kelangsungan, dan perkembangan desa. Adapun potensi fisik desa mencakup hal-hal sebagai berikut;



Gambar 2.8 Dari Data Desa Pemukiman desa Sawah
Kabupaten Empat Lawang

SKALA 1 : 2000



- **Tanah**, sumber pencarian masyarakat desa sawah pertanian yaitu bahan makanan seperti kopi, sayur mayur dan jagung untuk pakan ternak. Selebihnya tempat tinggal.
- **Air**, dari irigasi lintang kiri desa sawah dimanfaatkan untuk persawahan, pada 2020 - 2021 digunakan untuk cetak sawah baru.
- **Iklim**, desa sawah memiliki cuaca yang dingin karena berdekatan dengan gunung dempo pagar alam dan akhir-akhir ini curah hujan tinggi.
- **Ternak**, sebagian besar masyarakat desa sawah beternak sapi, kambing untuk dijual biasanya pada saat acara-acara penting dan sebagiannya lagi untuk di konsumsi pribadi contohnya ayam, itik dan bebek.
- **Manusia**, SDM di bidang pertanian masih masyarakat pribumi, hasil pertanian mereka dikirim ke pulau jawa

dan kota lainnya, contohnya kopi, Durian, Pepaya california. Sebagian SDM pemuda desa sawah selesai SMA mereka lebih banyak merantau ke pulau jawa.

- **Pariwisata**, merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata, contohnya seperti Cughop Ayek (air terjun) Degian, Puyang Putri dan berbagai cughop lainnya, Yang banyak di datangi pariwisata di saat weekend.

2. **Potensi Non Fisik desa**

Potensi Non Fisik Desa adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di desa yang bersangkutan. Potensi Non Fisik Desa ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

- **Masyarakat desa**, Masyarakat desa sawah melakukan gotong royong untuk melakukan berbagai kegiatan contohnya jika ada salah satu masyarakat yang mengadakan acara mereka saling membantu biasanya masyarakat sekitar menyebutnya negak lembongan dan negak mobongan yaitu membangun rumah. Produksi masyarakat desa sawah melakukan kegiatan salah satunya panen jagung.
- **Lembaga-lembaga Sosial, Pendidikan, Organisasi**, Desa sawah melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepemudaan desa antaranya Karang

Taruna, LPA, dan Pemuda Pemudi Empat Lawang. Yang membantu adanya korban-korban kebakaran dan bencana lainnya.

- **Aparatur dan Pamong desa**, Memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa seperti membuat surat domisili, surat keterangan tidak mampu, surat NH1-4 sertapihak BPD menjalin kerjasama dengan perangkat desa untuk merumuskan kegiatan-kegiatan desa antaranya musyawarah dusun MUSDUS, musyawarah desa MUSDES untuk merealisasikan dana desa.
- **Bidang Keamanan**, membentuk LIMAS Desa dan bekerjasama dengan Pol PP desa untuk membuat rasa aman dan nyaman di desa sawah.
- **Budaya**, Masyarakat desa sawah masih memegang teguh adat istiadat, contohnya kuntau daerah (macan belang) , tari 7 bidadari, dan diker.

E. Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Regional

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan korelasi antara fakta-fakta yang diamati, sehingga dapat menjadi kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Dengan makin majunya studi-studi pembangunan ekonomi, banyak teori telah

diintroduksikan. Dalam pembangunan wilayah, banyak teori dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan wilayah.

Pembangunan Regional merupakan fungsi dari potensi SDA, SDM, Tenaga Kerja, Investasi Modal, Prasarana dan Sarana Pembangunan, Transportasi dan Komunikasi, Komposisi Industri, Teknologi. Semua faktor di atas adalah penting, tetapi masih dianggap terpisah satu sama lain, dan belum menyatu sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan regional secara komprehensif.

F. Perencanaan Pembangunan Regional

Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan.

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan *Deutsche Fur Internationale*

Entwicklung (DSE) yang dituangkan dalam Modul Diklat Perencanaan Pembangunan daerah antara lain;

- Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri;
- Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya;
- Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana;
- Koordinasi yang baik;
- *Top down* dan *Bottom up planning*;
- Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus.

BAB 10

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka kesimpulan diambil analisis kebijakan sangat diperlukan dalam membuat suatu kebijakan karena berkaitan dengan tingkat keberhasilan tujuan yang akan dicapai dalam suatu kebijakan. integritas sektor publik juga harus diperhatikan, memiliki mutu yang baik tentunya akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah. Manajemen pelayanan publik perlu diterapkan dalam setiap organisasi perangkat desa yang menjalankan pelayanan publik, karena diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewirausahaan sektor publik berperan penting dalam menginisiasi, terdapat beberapa macam bumdes di desa sawah ini diantaranya kerajinan lokal dimana masyarakat membuat bunga dari kain bekas, makanan khas seperti permen labusiam, enggak kacang, kerupuk beras dan saus tomat. Desa sawah sendiri jarang terjadi bencana alam melainkan bencana sosial, misalnya saja oada tahun 2018

terjadi pembegalan yang dilakukan pada malam hari dengan targetnya anak-anak remaja dan lansia. Maka disini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan bencana yang bersifat alam maupun sosial, baik sebelum terjadi, pada saat dan setelah bencana terjadi.

Berdasarkan hasil analisis partisipasi masyarakat dalam membangun desa sawah kecamatan muara pinang dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan dalam membangun desa sawah, dengan diikutsertakan warganya dalam membuat ataupun menjalankan program-program tersebut akan menimbulkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa karena dianggap memperhatikan dan mendengarkan apa yang mereka inginkan. Dengan demikian program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama, sehingga masyarakat akan merasakan manfaatnya. Selain itu juga permasalahan yang ada di desa sawah dapat teratasi, dengan begitu indeks pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan tentunya membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa sawah.

Advokasi kebijakan sebagai bentuk dari rangkaian gerakan yang sistematis dan terorganisir untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka sistem yang ada. Peraturan yang disusun ini dapat diterapkan terhadap permasalahan di desa

sawah, sehingga mamph memberikan solusi atas permasalahan tersebut.pembangunan regional akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang orientasinya nanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masrakat pada wilayah tersebut. Tentunya untuk terus meningkatkan potensi yang ada pada wilayahnya agar dapat teroptimalkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara Sahya, 2012, Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia Sejati.

Abdul Wahab, Solichin, 2002, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Adiyoso, Wignoyo, 2018, Manajemen Bencana (Pengantar dan Isu-Isu Strategis. Jakarta: Bumi Aksara.

Ardian Januar Mahardhani, 2018, Advokasi Kebijakan Publik. Ponorogo: Calina Media.

Awan Y Abdoellah, Yudi Rusfiana, 2016, Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Budiman, 2021, Manajemen Pembangunan Wilayah. Bandung: FISIP UIN SGD Press.

Hayat, 2017, Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Hartini, Dkk, 2021, Perilaku Organisasi. Bandung: Widina Bhakti Persada.

I Khambali, 2017, Manajemen Penanggulangan Bencana. Yogyakarta: Andi.

- Idris Yanto Niode, 2014, *Entrepreneurial Government (Konsep dan Riset)*. Gorontalo: UNG Pers.
- Mahmudi, 2016, *Analisis Lapangan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Sawir, 2021, *Ilmu Administrasi Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ridwan, 2016, *Pembangunan Ekonomi Regional*. Yogyakarta: Pustaka Puitika.
- Umar Nain, 2019, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.

Sumber Lainnya,-

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jurnal

Dedi Afrizal dan Chalid Sahuri, 2012, “Analisis Manajemen Pelayanan Publik”, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.1, No.1.

Lesmana Rian Andika, 2019, “Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah”, Jurnal Riset Pembangunan, Vol.2, No.16.

Saeful Kholik, 2020, “Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Era Otonomi Daerah”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.6, No.1.

Susetiawan, Dkk, 2018, “Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.1.

Ulandari Safitri, 2021, “Urgensi Analisis Kebijakan”, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol.6, No.1.

Internet

[https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/pikinternal-desain-partisipasi-masyarakat-dalam pengawasan-pelayanan-publik.](https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/pikinternal-desain-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik)

<https://wartaekonomi.co.id/amp/read165039/kewirausahaan-sektor-publik-dan-pertumbuhan-ekonomi-daerah>.

<https://www.merdeka.com/jatim/ketahui-tujuan-wirausaha-beserta-fungsi-manfaat-dan-karakteristikny>

<https://empatlawangkab.go.id/v2/bupati-pimpin-apel-siaga-bencana-banjir-dan-tanah-longsor/>

<https://www.detiksumsel.com/daerah/amp/9748363877/tim-elang-polres-empat-lawang-berhasil-meringkus-2-pelaku-perampokan-warga-lampung>

<https://bpbd.kulonprogokab.go.id/detil/172/sosialisasi-penanggulangan-bencana-di-balai-desa-kaliagung>

<https://sumberdayaaair.malangkab.go.id/sumberdaya/air-opd-bagaimana-cara-menghindari-tanah-longsor>